

STRATEGI KEAMANAN SIBER AMERIKA SERIKAT DALAM PERANG DAGANG DENGAN CHINA

Denapoleon Jayakarta¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Trade wars are essentially conflicts between countries in the economic domain that involve several aspects, one of which is the trade tariffs imposed. The trade war between the United States and China arose from long-standing economic cooperation that eventually led to conflict. This conflict stemmed from investigations by U.S. advisors, conducted over approximately seven months, which concluded that China was engaging in unfair practices against the United States. China was accused of hacking or intercepting computer networks to steal American intellectual property. The U.S. President responded by signing a memorandum to address the issue. This situation seems to have piqued researchers' interest in studying this topic, as it remains relatively underexplored in depth.

In this study, the author will use a Neo-Realist approach, as this perspective is considered relevant for examining the issues at hand. Neo-Realism views the international structure as a determinant in defining national interests. Additionally, the researcher will employ concepts of cybersecurity, strategy, and trade wars. The research methodology involves a qualitative approach and descriptive-analytical research type. The findings indicate that factors hindering economic cooperation between the United States and China include betrayal, which has led to tensions between the two countries. U.S. cybersecurity strategies are employed to maintain national security and integrity.

Keywords: Defense Cooperation, Defense Equipment, National Interests

ABSTRAK

Perang dagang pada dasarnya merupakan konflik antar negara dalam bidang ekonomi yang melibatkan beberapa aspek dalam konflik tersebut, salah satunya adalah tarif dagang yang dikeluarkan. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, terjadi akibat kerjasama yang dilakukan sejak lama dalam bidang ekonomi menghadirkan konflik, akibat dari informasi penasihat Amerika Serikat melakukan penyelidikan yang dilakukan selama kurang lebih tujuh bulan dan menyimpulkan bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh negara China terhadap negara Amerika Serikat. Negara China dituduh melakukan peretasan atau penyadapan melalui jaringan komputer untuk mencuri kekayaan intelektual bisnis Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat mengambil langkah untuk mengatasi hal ini dengan menandatangani memorandum. Hal tersebut tampaknya membuat peneliti tertarik untuk mengkaji topik ini karena pada dasarnya masih jarang diteliti secara mendalam.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Neo-Realisme, karena pendekatan Neo-Realisme ini dianggap relevan untuk mengkaji masalah yang diangkat. Pandangan Neo-Realisme menjadikan struktur internasional sebagai penentu dalam menentukan kepentingan nasional. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan konsep keamanan siber, konsep strategi, dan konsep perang dagang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam kerjasama ekonomi Amerika Serikat dengan China, adanya pengkhianatan yang dilakukan sehingga bisa membuat kedua negara menjadi bersitegang. Strategi keamanan siber Amerika Serikat dilakukan untuk tetap bisa mempertahankan keamanan dan keutuhan negara.

Kata kunci: Kerjasama Pertahanan, Alutsista, Kepentingan Nasional

PENDAHULUAN

Perang dagang pada dasarnya merupakan konflik antar negara dalam bidang ekonomi yang melibatkan beberapa aspek dalam konflik tersebut, salah satunya adalah tarif dagang yang dikeluarkan (Anggraeni, 2019). Dalam Perang Dagang yang terjadi, sebuah negara akan mengeluarkan sebuah tarif yang melambung tinggi yang mana hal ini akan berdampak pada negara-negara yang mengekspor barang mereka pada negara yang mengeluarkan tarif tersebut. Negara-negara yang terlibat dalam perang dagang saling menjatuhkan dalam harga dimana hal ini tentu akan merugikan pihak yang lain. Kerugian yang timbul membuat perang dagang ini tidak berkesudahan dan terus berlanjut karena masing-masing negara merasa ingin lebih unggul dari negara lain dan menjatuhkan pihak lawan yang mana nantinya akan memberikan dampak baik bagi pemenang dalam perang dagang tersebut.

Dewasa ini, semua negara di dunia melakukan kerjasama atau membangun hubungan yang harmonis melalui kerjasama dalam segala aspek kehidupan. Negara yang satu dengan negara yang lain bersepakat untuk melakukan kerjasama sehingga hubungan dua negara dapat berjalan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk membuat konflik sulit terjadi atau mengurangi masalah antar negara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama juga dapat membuat masalah- masalah antar negara itu muncul sehingga menyebabkan hubungan antar kedua negara atau lebih menjadi kurang baik, lebih parah bisa mengakibatkan peperangan. Adanya ketidaksamaan dalam kepentingan membuat kerjasama itu pun akhirnya mengalami kehancuran.

Amerika Serikat dan China sudah melakukan kerjasama sejak lama dalam bidang ekonomi. Kedua negara ini membutuhkan satu sama lain dalam impor- ekspor untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi kemudian penasihat Amerika Serikat melakukan penyelidikan yang dilakukan selama kurang lebih tujuh bulan dan menyimpulkan bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh negara China terhadap negara Amerika Serikat. Negara China dituduh melakukan peretasan atau penyadapan melalui jaringan komputer untuk mencuri kekayaan intelektual bisnis Amerika Serikat (Kompas, 2018).

Presiden Amerika Serikat mengambil langkah untuk mengatasi hal ini dengan menandatangani momerandum pada tanggal 22 Maret 2018 tentang kenaikan bea masuk untuk produk China. Kenaikan tarifbea masuk dari Amerika Serikat untuk China kurang lebih sebesar US\$50 miliar atas produk China yang masuk ke negaranya. Bukan hanya itu, Amerika Serikat juga menetapkan tarif impor 10% alumunium dan 25% baja dari China. Kenaikan dan penetapan tariff bea masuk oleh Amerika Serikat atas produk China dimaksudkan untuk menjaga keamanan kekayaan intelektual yang sebelumnya telah dicuri.

Perang dagang ini juga belum menemui titik temu untuk bisa saling berdamai kembali dan kerjasama keduanya bisa terjalin baik seperti sebelumnya. Meskipun sedang terjadi Perang Dagang antar kedua negara, namun pertumbuhan ekonomi kedua negara berangsur membaik di tahun 2020. Negara Amerika Serikat mengalami penurunan di tahun sebelumnya karena dampak dari resesi yang terjadi. Berikut grafik pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang disajikan oleh peneliti.

Jika dilihat dari grafik tersebut Amerika Serikat mengalami penurunan di tahun 2019. Di tengah-tengah pergolakan resesi yang tengah dirasakan oleh negara Amerika Serikat di tahun 2019, negara adidaya ini bisa kembali meningkatkan ekonominya di kuartal III pada tahun selanjutnya hingga mencapai 33,1%. Peningkatan secara signifikan

ini pun memberi dampak pada kinerja perdagangan yang semakin membaik. Meskipun sempat menurun, namun Amerika Serikat mampu meningkatkan kembali perekonomiannya.

Tidak hanya negara Amerika Serikat yang mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi negara China juga semakin membaik di tahun 2020 pada kuartal IV. China mampu mendobrak pasar global ditengah pandemi yang sedang berlangsung padahu tahun 2020. Keadaan ekonomi China yang semakin membaik memberi dampak yang baik pula pada persaingan dagangnya. Berikut grafik pertumbuhan ekonomi China yang disajikan oleh peneliti.

Jika dilihat pada grafik tersebut, negara China mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dibanding dengan tahun sebelumnya di kuartal yang sama yaitu kuartal IV. Meskipun tidak begitu melambung tinggi, namun peningkatan ini dianggap lebih baik dibanding negara-negara lain. China berhasil mengendalikan perekonomiannya selama pandemi dan lebih memfokuskan pada investasi (Lidwina, 2021).

Meski pada awalnya ketegangan yang terjadi di antara kedua negara adalah karena Amerika Serikat merasa telah dikhianati oleh negara China tentang peretasan data intelektual yang dilakukan, namun ada hal lain yang mengakibatkan Amerika Serikat pada akhirnya membuat sebuah kebijakan mengenai menaikkan bea tariff dari barang-barang yang diekspor oleh negara China. Hal tersebut adalah pada tahun 2018 negara Amerika Serikat terus mengalami defisit dalam neraca perdagangan dengan China. Hal ini tentu saja dianggap menjadi sebuah ancaman bagi negara besar di dunia itu.

Keamanan siber adalah sebuah rangkaian aktifitas dan pengukuran yang dimaksudkan untuk melindungi dari serangan, disrupsi, atau ancaman yang lainnya melalui elemen-elemen cyberspace (hardware, software, computer network) (Fischer, 2011). Keamanan siber Amerika Serikat tergolong sulit untuk diretas karena penjagaannya yang sangat ketat juga dengan teknologi negara adidaya tersebut yang sudah kian pesat. Negara Amerika Serikat menjadikan keamanan siber sebagai kepentingan nasional yang vital yang mana hal ini berkaitan dengan ekonomi karena bidang ekonomi dan informasi tidak dapat dipisahkan dan keduanya menjadi prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Cavelty, 2007). Kebijakan keamanan sistem informasi Amerika Serikat sudah ada sejak tahun 2000. Namun pada 2018, terjadi peretasan data internal milik AS oleh China.

Amerika Serikat dikenal dengan sistem keamanan sibernya yang kuat, namun pada kenyataannya data intelektual milik Amerikat Serikat bisa diretas oleh negara China. Hal tersebut menyebabkan polemik tak berkesudahan dari kedua negara tersebut dalam sebuah perang dagang sengit yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti Bagaimana strategi keamanan siber Amerika Serikat agar kejadian peretasan tidak terjadi lagi dan menekan intensitas dampak yang diakibatkan oleh pembobolan sistem informasi tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi keamanan Siber Amerika Serikat dalam Perang dagang dengan China?

KERANGKA ANALITIK

Pendekatan Neorealisme

Neorealisme adalah teori umum yang dipakai pada situasi sejarah lain di samping Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pendekatan neorealis dianggap masih relevan untuk digunakan di masa sekarang untuk menjelaskan hubungan internasional (Waltz, 2010). Tidak seperti pendekatan realis, namun pendekatan neorealis berangkat dari asumsi-asumsi dasar dari pendekatan realis. Hal-hal yang dianggap sebagai kebijakan normatif oleh Waltz dikembangkan kembali dari pendekatan realis dimana ia menganggap hal tersebut dapat terlihat lebih ilmiah dari asumsi atau isu yang dianggap terlalu tidak ilmiah seperti pemikiran Morgenthau tentang perang bisa terjadi karena kodrat manusia yang memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri. Menurutnya asumsi tersebut tidak bisa diuji keabsahannya dan terlalu subjektif dalam sebuah penelitian.

Pendekatan Neorealis sendiri lebih menitikberatkan pada struktur atau sistem internasional yang anarki. Perang antar dua negara bisa terjadi karena sistem internasional yang membuat keduanya akhirnya melakukan hal tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup masing-masing negara. Pada dasarnya neorealis lebih mementingkan keunggulan atau keuntungan relative dalam sebuah hubungan internasional yang dijalin oleh negara-negara di dunia. Neorealis mengacu pada kapabilitas negara-negara yang berbeda, ada negara besar dan ada juga negara kecil (Baldwin, 1993). Dalam sistem internasional itu sendiri negara-negara besar akan mengambil peran untuk mengendalikan sistem atau struktur tersebut. Negara-negara besar pasti memiliki kepentingan yang besar dan juga pengaruh yang tak kalah besar bagi negara-negara kecil. Menurut Waltz ketertiban internasional akan tercapai apabila dua negara besar bisa mengendalikan sistem internasional yang anarki.

Sistem bipolar dianggap lebih bisa mencapai dan menjaga ketertiban internasional. Jika hanya ada dua yang mengendalikan sistem internasional, maka kemungkinan kedua negara untuk terlibat dalam sebuah konflik yang besar pun menjadi lebih rendah. Berbeda jika sistem multipolar, karena semakin banyak negara besar yang ikut andil dalam pengendalian sistem internasional maka semakin banyak pula dorongan untuk terjadinya sebuah perang karena kepentingan masing-masing negara di dalamnya menjadi sangat kompleks dan sulit mengatur intensitas terjadinya sebuah konflik antar negara atau bahkan lebih.

Konsep Strategi

Setiap negara di dunia memiliki strategi masing-masing dalam merumuskan politik luar negeri mereka yang berkenaan langsung dengan kepentingan nasional. Strategi tersebut diharapkan bisa mencegah terjadinya pengrusakan atau penghancuran kepentingan nasional dan meminimalisir tindakan ancaman dari pihak manapun baik internal maupun eksternal. Demi tercapainya kepentingan nasional, negara harus memiliki strategi-strategi yang nantinya dapat menunjang tercapainya kepentingan nasional.

Strategi yang dicetuskan oleh Lykke terbagi ke dalam tiga bagian yakni means, ways, dan ends (*Military Strategy*, 1983). Means adalah sarana untuk mencapai tujuan. Ways adalah cara untuk mencapai tujuan. Ends adalah tujuan yang ingin dicapai. Bisa

disimpulkan bahwa tiga unsur tersebut menjadi bagian utama yang mendasarkan pembentukan sebuah strategi. Strategi-strategi yang dimiliki oleh sebuah negara berkaitan erat dengan politik luar negeri negara tersebut. Strategi itu nantinya akan berpengaruh pada keputusan kebijakan luar negeri. Hal ini karena setiap negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga berjalannya kebijakan tergantung dari strategi yang dimiliki oleh sebuah negara.

Konsep strategi pada dasarnya bagian dari konsep keamanan sebuah negara. Dewasa ini, konsep strategi memiliki pemahaman yang lebih luas, tidak hanya bisa dilihat dari segi keamanan tapi juga dari berbagai aspek. Jadi bisa disimpulkan bahwa konsep strategi sangat berkaitan erat dengan politik luar negeri dan kunci dari kemakmuran dalam perang adalah dengan merahasiakan strategi sekecil apapun dari pihak lawan. Sehingga kepentingan bisa tercapai meski tanpa pertumpahan darah.

Konsep Keamanan Siber

Keamanan Siber merupakan dimensi keempat dalam keamanan nasional kontemporer menurut Nazri Choucri (Choucri, 2012). Hal ini mengacu kepada kemampuan negara dalam melindungi keamanan nasional mereka sendiri dari adanya ancaman siber seperti spionase, sabotase, kejahatan penipuan, pencurian, dan lain sebagainya. Setiap negara di dunia hendaknya menjadikan keamanan siber menjadi prioritas karena hal ini berhubungan dengan jaminan informasi yang dapat diketahui oleh pihak yang meretas. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara jika ancaman siber itu datang.

Kejahatan siber menjadi isu yang krusial dalam hubungan internasional. Maka dari itu dalam konteks hubungan internasional mengidentifikasi keamanan siber menjadi dua bagian yaitu cyber conflict dan cyber cooperation (Valeriano & Maness, 2014). Cyber conflict adalah penggunaan teknologi dengan cara mengubah atau merusak informasi rahasia milik sebuah negara yang akan mengakibatkan konflik antar dua negara. Sementara cyber cooperation adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bidang siber karena memiliki tujuan yang sama dan kepentingan yang harus dilakukan bersama demi tercapainya tujuan tersebut. Kerjasama dilakukan karena kepentingan yang tidak bisa dicapai secara individual, sehingga membutuhkan negara lain dalam kerjasama tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif pada dasarnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian tanpa melibatkan angka (Bakry, 2016). Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang didasarkan dari perhitungan atau kuantitas. Meskipun begitu, metode penelitian kualitatif tetap dianggap ilmiah dan relevan karena metode ini menekankan pada kealamiah sumber data. Penelitian alamiah akan dibutuhkan dan dimanfaatkan terutama pada saat penjelasan definisi atau paradigma alamiah. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif adalah cara atau upaya dalam menjelaskan sebuah fenomena sosial, sebuah perspektif, sebuah tindakan, dan sebagainya dengan menggunakan kata-kata (Bakry, 2016). Kata-kata tersebut dirangkai menjadi kalimat-kalimat ke dalam konteks isu yang sedang diteliti secara alamiah dan dapat memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Secara khas, metode penelitian kualitatif tidak memasukkan sumber data dalam bentuk angka namun sumber data yang ilmiah dalam bentuk kata dan bisa dideskripsikan dalam penelitian tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penulis ingin menjelaskan secara deskriptif permasalahan yang diteliti. Penulis ingin meneliti secara mendalam bagaimana Amerika Serikat membuat strategi keamanan sibernya dalam Perang Dagang dengan China. Factor-faktor apa saja yang melatarbelakangi startegi keamanan siber tersebut sehingga terciptalah kebijakan-kebijakan yang mana hal tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan nasionalnya.

PEMBAHASAN

Strategi Keamanan Siber Amerika Serikat Dalam Perang Dagang Dengan China

Amerika Serikat menghadapi ancaman peretasan siber yang dilakukan oleh China, khususnya terhadap data intelektual, yang berdampak pada kedaulatan negara. Untuk melindungi keamanan sibernya, AS menerapkan strategi defensif dan ofensif. Strategi defensif bertujuan menjaga hubungan baik dengan China dan menghindari konflik, sementara strategi ofensif melibatkan kebijakan ekonomi yang keras, seperti perang dagang, yang menimbulkan ketegangan.

Strategi defensif AS meliputi peningkatan kemampuan sibernya melalui Cyber Security and Infrastructure Security Agency (CISA) dan memperkuat Komando Siber. Selain itu, AS mendukung undang-undang yang mengatur operasi siber militer dan melakukan operasi ofensif terhadap negara lain, termasuk Rusia dan Iran. CISA juga secara aktif memantau serangan siber dari China yang menargetkan sektor-sektor penting di AS, seperti energi, kesehatan, dan IT.

Perjanjian antara AS dan China tentang keamanan siber sebenarnya sudah ada sejak 2015, saat Presiden Xi Jinping dan Presiden Obama menyepakati bahwa tidak ada pemerintah yang akan mendukung pencurian kekayaan intelektual melalui siber. Namun, meski ada perjanjian, China tetap melakukan peretasan, terutama ketika ekonomi mereka melambat. Dialog Penegakan Hukum dan Keamanan Siber AS-China terus dilakukan pada masa pemerintahan Trump, tetapi serangan siber dari China terus berlanjut dengan teknologi yang semakin canggih.

Kemunculan China sebagai kekuatan global utama telah mengubah lanskap dunia siber. Dengan jumlah pengguna internet terbesar, ekonomi yang berkembang, serta kemampuan militer dan intelijen yang semakin kuat, China memanfaatkan aset-aset ini untuk membentuk kebijakan luar negeri yang berfokus pada kontrol teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan ini berpotensi merusak tatanan global yang selama ini didominasi oleh demokrasi liberal Barat. Amerika Serikat melihat peningkatan kekuatan siber China sebagai ancaman besar, terutama dalam konteks spionase siber dan ancaman terhadap data rahasia AS, termasuk di sektor ekonomi. Meskipun spionase siber tidak langsung menyebabkan konflik bersenjata, ketegangan antara kedua negara terus meningkat. Ketakutan berlebihan terhadap pertumbuhan kekuatan China, seperti yang disebut oleh Joseph Nye, bisa memicu konflik di masa depan, termasuk dalam dunia maya.

Pada masa pemerintahan Donald Trump, AS mengimplementasikan strategi defensif dan ofensif dalam menghadapi ancaman siber dari China. Strategi defensif bertujuan meningkatkan keamanan internal tanpa memicu konflik besar, sementara

strategi ofensif diterapkan untuk menekan China yang terus melakukan peretasan berulang kali. Hal ini juga terkait dengan perang dagang yang akhirnya terjadi antara kedua negara. Dengan menggabungkan kedua strategi ini, AS berusaha menjaga kepentingan nasionalnya, terutama di bidang keamanan siber, serta mempertahankan posisinya di tengah persaingan global dengan China.

Pada September 2020, Amerika Serikat kembali membatasi impor chip dari China dengan alasan risiko keamanan yang tinggi, memicu ketegangan baru dalam hubungan kedua negara. Kebijakan ini mencerminkan ketakutan Presiden Trump terhadap ancaman dari China, yang berkembang pesat dalam bidang ekonomi dan teknologi. Meskipun terlihat agresif, strategi ofensif Trump bertujuan melindungi kepentingan nasional AS, terutama keamanan siber yang mengandung data-data rahasia, termasuk rahasia dagang.

Konflik dagang antara AS dan China sempat mereda pada Januari 2020 setelah keduanya menandatangani perjanjian perdagangan yang difasilitasi oleh WTO. WTO memutuskan bahwa tarif yang diberlakukan AS tidak adil dan melanggar aturan perdagangan internasional. Meskipun begitu, ketegangan kembali meningkat setelah pembatasan ekspor diberlakukan lagi oleh AS pada September 2020. Strategi ofensif AS hanya menguntungkan satu pihak, namun Trump tetap memilih pendekatan ini untuk mempertahankan posisi AS sebagai negara adidaya. Para ahli menganggap kebijakan ini kurang relevan dan berisiko, namun sesuai dengan asumsi neorealis tentang kepentingan nasional. Bagi Trump, menjaga kedaulatan dan kekuatan AS adalah prioritas utama, meskipun harus berhadapan dengan konflik dengan negara lain.

Strategi ofensif adalah strategi menyerang dalam menentukan sebuah kebijakan. Berbeda dengan strategi defensif yang tidak akan memperburuk hubungan kedua negara yang terlibat dalam sebuah konflik, strategi ofensif memberikan ketegangan pada dua negara sehingga hubungan kedua negara yang awalnya harmonis bisa menjadi sangat buruk dan akhirnya mengakibatkan konflik yang tak berkesudahan. Strategi ofensif akan dianggap merugikan bagi pihak lawan sehingga negara lain sebagai pihak lawan akan melakukan penyerangan yang sama. Amerika Serikat tak hanya membuat strategi defensif tetapi juga strategi ofensif. Sebelum memberlakukan kebijakan yang bersifat ofensif, Trump sudah terlebih dahulu melakukan observasi pada peretasan-peretasan dan pencurian- pencurian kekayaan intelektual milik Amerika Serikat. Selama melakukan observasi, Trump mencari jalan untuk mengeluarkan kebijakan yang tetap bisa menghindari peretasan terjadi lagi namun juga tetap menjaga keharmonisan hubungan dengan China.

Strategi ofensif Amerika Serikat dalam menjaga keamanan sibernya adalah dengan memberlakukan kebijakan bea tarif yang lebih tinggi dari kesepakatan awal dengan China. Presiden Amerika Serikat mengambil langkah untuk mengatasi hal ini dengan menandatangani momerandum pada tanggal 22 Maret 2018 tentang kenaikan bea masuk untuk produk China. Kenaikan tariff bea masuk dari Amerika Serikat untuk China kurang lebih sebesar US\$50 miliar atas produk China yang masuk ke negaranya. Bukan hanya itu, Amerika Serikat juga menetapkan tariff impor 10% alumunium dan 25% baja dari China. Sebelumnya, Trump mengambil langkah damai untuk tidak memberlakukan kebijakan yang akan memberatkan negara China. Namun alih-alih menyepakati hal tersebut, China tidak mengakui kasus pencurian data intelektual milik Amerika Serikat. Hal ini akhirnya membuat Trump memilih untuk memberlakukan kebijakan bea tariff impor yang meningkat sebagai upaya dari menjaga keamanan sibernya dari pencurian dan spionase dalam dunia maya.

Pemerintah memberlakukan kebijakan domestik dan memimpin kampanye diplomatik untuk mencegah perusahaan teknologi China mendapatkan pijakan atau memperluas jangkauan mereka. Strategi tersebut dipadukan dalam program Clean Network, sebuah inisiatif untuk melindungi jaringan siber di “dunia bebas dari aktor jahat otoriter”, yaitu China. Jika ditinjau dengan teori neorealisme, neorealis menitikberatkan pada sistem ekonomi politik domestik negara untuk bisa bersaing dengan negara besar lainnya dalam mengurus struktur atau sistem internasional. Kestabilan yang tercapai di domestik akan memberikan sebuah keuntungan berupa keamanan dalam segala bidang yang tentu ingin dicapai oleh negara Amerika Serikat sebagai negara besar.

Trump memberlakukan kebijakan ekonomi untuk China agar membatasi ruang dari perusahaan teknologi China sehingga tidak bisa memperluas pasarnya di Amerika Serikat yang mana hal ini memberikan pengaruh untuk keamanan siber Amerika Serikat. Menurut Waltz ketertiban internasional akan tercapai apabila dua negara besar bisa mengendalikan sistem internasional yang anarki. Sejatinya hal ini sulit dicapai karena masing-masing negara memiliki kepentingannya masing-masing termasuk negara besar. Semua negara akan melakukan apapun demi menjaga kepentingan nasionalnya dan kecurangan dalam kerjasama antar dua negara bisa terjadi kapan saja, sehingga jelas bahwa ketertiban internasional akan sulit untuk dicapai meskipun oleh hubungan antara Amerika Serikat dan China sekali pun. Strategi ofensif akan memperburuk hubungan dua negara, bisa dilihat bahwa situasi kedua negara yang sarat akan ketegangan. Amerika Serikat dan China akhirnya terlibat dalam Perang Dagang setelah Trump memberlakukan kebijakan bea tariff yang dianggap merugikan negara China.

Negara China menjadi negara yang tidak bisa dianggap remeh oleh Amerika Serikat dalam masalah ekspor. Bisa dilihat dari tahun ke tahun negara tirai bambu itu terus mengalami peningkatan yang pesat dalam perdagangan dan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. China bahkan mengalahkan Amerika Serikat dalam nilai ekspor. Trump menganggap ini sebagai ancaman bagi negara mereka.

KESIMPULAN

Setelah terjadi peretasan, Trump memiliki dua strategi utama dalam memperkuat dan melindungi keamanan sibernya. Strategi pertama adalah strategi defensif, yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara Amerika Serikat dan China, sekaligus menghindari ketegangan yang dapat memicu konflik antar kedua negara. Strategi ini lebih bersifat bertahan dan difokuskan pada diplomasi serta mitigasi ancaman siber melalui penguatan sistem keamanan internal. Dengan mengurangi eskalasi, Trump berusaha menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan politik antara kedua negara.

Namun, selain strategi defensif, Trump juga mengadopsi strategi ofensif, yang lebih agresif dalam merespons ancaman siber. Dalam strategi ini, Amerika Serikat tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga mengambil tindakan tegas yang berpotensi memicu konflik terbuka. Salah satu contohnya adalah penerapan kebijakan ekonomi yang keras terhadap China, seperti peningkatan tarif dan sanksi perdagangan, yang berdampak buruk pada perekonomian China. Kebijakan ini akhirnya memicu perang dagang antara kedua negara, dengan masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingan nasional mereka. Konflik ini semakin rumit karena baik Amerika Serikat maupun China bersikeras untuk tidak mundur demi melindungi kepentingan strategis mereka.

Dalam konteks kepentingan nasional, setiap negara cenderung bertindak tegas untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan mereka, terutama ketika merasa terancam oleh negara lain. Hubungan kerja sama yang dibangun selama bertahun-tahun bisa retak akibat tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan, seperti peretasan atau penyadapan. Dalam kasus Amerika Serikat dan China, persaingan kepentingan dalam bidang ekonomi dan teknologi semakin memperuncing hubungan mereka, dengan keduanya mengambil langkah-langkah yang dinilai perlu untuk melindungi keamanan nasional. Meskipun strategi defensif bisa meredam konflik sementara, Trump pada akhirnya memilih strategi ofensif yang lebih konfrontatif untuk menghadapi ancaman yang dianggap serius.

Selain peretasan, keamanan siber juga menjadi salah satu isu penting yang dihadapi Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negaranya. Serangan siber yang terus meningkat, terutama dari negara-negara seperti China, mendorong AS untuk lebih memperkuat infrastrukturnya, baik melalui kebijakan internal maupun kerja sama internasional. Langkah-langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran data dan melindungi aset strategis yang krusial bagi pertahanan negara. Dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, Amerika Serikat terus menyesuaikan strategi keamanan sibernya agar tetap selangkah lebih maju dalam mengantisipasi ancaman global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. (2019). Perang dagang dalam hukum perdagangan internasional. *Al-Ahkam*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1967>
- Baldwin, D. A. (1993). *Neorealism and neoliberalism: The Contemporary Debate*. Columbia University Press.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode penelitian hubungan internasional*.
- Cavelty, M. D. (2007). *Cyber-Security and threat politics: US Efforts to Secure the Information Age*. Routledge.
- Choucri, N. (2012). *Cyberpolitics in international relations*.
- Fischer, E. A. (2011). *Creating a national framework for cybersecurity: An Analysis of Issues and Options*.
- Kompas. (2018, April 2). AS Siap Hadang ”China 2025”. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2018/04/03/as-siap-hadang-china-2025>
- Military strategy: Theory and Application: a Reference Text for the Department of Military Strategy, Planning, and Operations, 1983-1984*. (1983).
- Lidwina, A. (2021, January 21). Ekonomi Tiongkok Berhasil Pulih pada Kuartal IV-2020. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/21/ekonomi-tiongkok-berhasil-pulih-pada-kuartal-iv-2020>
- Waltz, K. N. (2010). *Theory of international politics*. Waveland Press.
- Valeriano, B., & Maness, R. C. (2014). The dynamics of cyber conflict between rival antagonists, 2001–11. *Journal of Peace Research*, 51(3), 347–360. <https://doi.org/10.1177/0022343313518940>